



Proyek Pengadaan Buku Disorot

Dana Tak Rasional, Pemkab Pertimbangkan Pembatalan

SINGARAJA - Proyek pengadaan buku di Kabupaten Buleleng mendapat sorotan publik. Betapa tidak? Nilai pengadaan buku itu mencapai miliaran rupiah. Hanya saja proyek dipecah ke beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari dinas, kecamatan, hingga kelurahan. Bahkan banyak desa juga menganggarkannya dalam APBDes.

Sorotan muncul karena proyek pengadaan buku pada APBD Induk 2017, yang dialokasikan pada 14 SKPD, sembilan kecamatan, serta 19 kelurahan di Kabupaten Buleleng. Nilainya pun bervariasi. Untuk SKPD, dialokasikan antara Rp 100 juta hingga Rp 150 juta,



Proyek Pengadaan Buku Di Buleleng

- Nilai proyek miliaran rupiah dan dipecah per SKPD.
- 14 SKPD masing-masing dialokasikan dana Rp 100 juta sampai Rp 150 juta.
- Dari 19 Kelurahan, masing-masing Rp 25 juta.
- Untuk kecamatan dianggarkan Rp 100 juta, sedangkan desa Rp 50 juta.
- Banyak yang menilai, pengadaan buku tersebut dengan anggaran miliaran tidak rasional karena bahan bisa di dapat di internet.
- Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka mengakui pengadaan buku ini membawa isu negatif dan pihak pemerintah bisa saja mengambil opsi pembatalan.

GT.DEWANTARA/RADAR BALI

untuk kecamatan Rp 100 juta, dan untuk kelurahan Rp 25 juta. Itu belum termasuk desa, yang juga dialokasikan Rp 50 juta. Rencananya proyek itu akan direalisasikan pada tri wulan pertama 2017.

Masalahnya, proyek pengadaan buku dengan nilai cukup besar itu, dianggap tidak rasional. Alasan bahan-bahan bacaan yang dianggarkan, sudah dapat ditemui di internet. Mengingat bahan yang

dianggarkan lebih banyak terkait dengan regulasi pemerintahan.

Selain itu pengadaan buku dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Pihak Kejaksaan Negeri Singaraja, juga disebut ikut pro aktif mendorong proyek ini berjalan. Terutama ketika pihak kejaksaan hadir dalam pertemuan di Inspektorat Buleleng, bulan lalu. Saat *Jawa Pos Radar Bali* melakukan penelusuran, ternyata proyek pengadaan buku itu memang benar adanya. Proyek itu sudah tercantum dalam buku APBD Induk 2017.

Di Dinas Pertanian Buleleng misalnya. Belanja buku di instansi ini menghabiskan dana hingga Rp 300 juta. Rinciannya belanja pengadaan buku/kepustakaan sebesar Rp 175 juta, belanja pengadaan buku ilmu pengetahuan dan teknologi senilai Rp 150 juta, dan belanja pengadaan buku

peraturan perundang-undangan senilai Rp 25 juta. *Output* kegiatan ini disebut tersedianya bahan bacaan dan bertambahnya wawasan.

Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka yang dikonfirmasi kemarin, tak menampik adanya proyek pengadaan buku itu. Puspaka menegaskan proyek itu hingga kini belum berjalan. Menurut Puspaka, pemerintah sudah menyusun anggaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan APBD 2017.

"Nanti kami lirik. Kita memang sedang defisit. Nanti kami cari-cari, kami sisir lagi, rasionalisasi lagi. Kalau memang ini jadi isu negatif, lebih baik sudah (tidak dilanjutkan). Jangan sampai memunculkan praduga yang macam-macam," katanya lagi. (eps/gup)

Edisi : Selasa, 11 Juli 2017

Hal : 28



Bendesa Adat Resmi Tersangka

Diduga Korupsi Dana BKK Provinsi

TABANAN - Bendesa Desa Adat Candi Kuning, Baturiti, Tabanan, Made Susila Putra resmi menjadi tersangka. Dia diduga melakukan korupsi dana bantuan keuangan khusus (BKK) Provinsi tahun 2015 senilai Rp 200 juta. "Sudah ditetapkan tersangka berinisial MSP sebelum Lebaran kemarin," Kasi Intel Kejari Tabanan Rio Irnanda, dikonfirmasi kemarin. Dia mengatakan, penyidik menetapkan tersangka terhadap Susila lantaran sudah ada alat bukti yang cukup. Minimal dua alat bukti berupa sejumlah dokumen, dan saksi-saksi. "Ada

sekitar 20 saksi yang diminta keterangannya," kata dia.

Dijelaskan, kerugian negara diduga Rp 200 juta, sesuai besaran bantuan tersebut. Meski demikian, akunya, tersangka belum ditahan. Dia tidak menjelaskan alasannya. Termasuk apakah tidak ada kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti, dia mengatakan, sejumlah barang bukti, termasuk dokumen sudah disita.

Rio mengatakan, meski sudah memiliki alat bukti yang cukup, pihaknya masih meminta audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Katanya, jaksa sebetulnya bisa menghitung sendiri kerugian dalam per-

kara ini. Namun, audit BPKP akan menjadi salah satu alat bukti. "Hasil audit BPKP untuk menguatkan," jelas dia.

Ditanya apakah ada tersangka lain, Rio mengatakan, tidak menutup kemungkinan begitu. "Dari penetapan tersangka ini kan mungkin bisa berkembang. Tidak menutup kemungkinan tersangka lainnya," tandasnya. (yor/rid)



BADUNG ✓

36 WP Tunggak Pajak Senilai Rp 501 Juta

MANGUPURA- Sebanyak 36 Wajib Pajak (WP) yang menunggak pajak di Kabupaten Badung. Tak tanggung-tanggung, besaran WP yang menunggak pajak tembus sekitar Rp 501 miliar atau setengah miliar lebih. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Badung membidik 36 wajib pajak (WP) yang menunggak tersebut, dan mengancam akan menyita aset-aset WP bila tidak melakukan pelunasan.

Kepala Bapenda Badung I Made Utama menegaskan, akan mengambil tindakan apabila WP penunggak pajak tidak melunasi piutangnya. Karena pihaknya sudah mendapat instruksi dari Bupati Badung untuk menindak penunggak pajak. Apalagi Badung juga menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Kami sudah mendapat instruksi dari pimpinan (bupati, red) agar mengambil tindakan tegas terhadap wajib pajak penunggak pajak. Tentu dalam mengambil tindakan harus berdasarkan koridor perundang-undangan yang berlaku," jelas Utama, Senin (10/7).

Kata dia, total piutang pajak sebesar Rp 501 miliar lebih dari semua jenis pajak. Piutang terbesar pada Pajak Hotel dan Restoran (PHR). Sayangnya pejabat asal Pecatu ini enggan menyebut nama-nama WP nakal tersebut. Namun, Bapenda Badung telah menyiapkan spanduk bertuliskan, "Hotel Ini Menunggak Pajak Daerah". Bila dalam jangka waktu 2x24 jam tidak melunasi tunggakan pajak akan dilakukan penyitaan terhadap aset-aset hotel ini. "Tapi kalau tetap membandel, kita akan lakukan tindakan tegas berupa penyitaan aset-aset. Karena memang dibenarkan oleh undang-undang," pungkasnya. (dwi/han)

Edisi : Selasa, 11 Juli 2017

Hal : 25